

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

UNIT KERJA : PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
TAHUN : 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	194 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	44 Laporan	Desember 2026	Triwulan I: - Tindak lanjut laporan masyarakat - Gelar laporan bersama dengan atasan Terlapor - Pelaksanaan pengawasan tematik (Galian C ilegal) Triwulan II: - Tindak lanjut laporan masyarakat - Gelar laporan bersama dengan atasan Terlapor - Pelaksanaan pengawasan tematik (SPMB)	Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, dan Keasistenan Pemeriksaan Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan III: - Tindak lanjut laporan masyarakat - Gelar laporan bersama dengan atasan Terlapor - Pelaksanaan pengawasan tematik (SPMB) Triwulan IV: - Tindak lanjut laporan masyarakat - Gelar laporan bersama dengan atasan Terlapor - Pelaksanaan pengawasan tematik	
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	1 Laporan				1 Laporan	November 2026	Triwulan I: - Persiapan pemetaan data laporan sebagai data dukung penentuan tema - Sinkronisasi tema IAPS dengan Program Prioritas	Keasistenan Pemeriksaan Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
	penyelenggara pelayanan publik							Presiden Triwulan II: - Pengumpulan informasi dari media masa dan stakeholder Triwulan III: - Pelaksanaan pemeriksaan IAPS Triwulan IV: - Penyampaian LHP IAPS kepada Terlapor dan Atasan Terlapor - Monitoring tindak lanjut LHP	
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	9 Pemerintah Daerah				9 Pemerintah Daerah	Desember 2026	Triwulan I: - Persiapan dan Perencanaan - Koordinasi awal dengan K/L/D Triwulan II: - Lokakarya Internal - Sosialisasi kepada K/L/D - Pendampingan	Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								K/L/D Triwulan III: - Pengambilan Data pada K/L/D Triwulan IV: - Supervisi - Pengolahan Data - Penyusunan Laporan - Lokakarya Akhir - Penyerahan Hasil Penilaian	
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Bulan Desember 2026	Triwulan I: - Persiapan dan identifikasi layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	ASN Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELE SAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan II: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan III: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan IV: - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	

KEPALA PERWAKILAN
 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 PROVINSI BANTEN,

 Bedli Afriadi